

INDONESIA YANG DIBAYANGKAN: PERISTIWA 1965-1966 DAN KEMUNCULAN EKSIL INDONESIA¹

THE IMAGINED INDONESIA: THE 1965-1966 TRAGEDY AND THE EMERGENCE OF INDONESIAN EXILES

Wahyudi Akmaliah

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI)
wahyudiakmaliah@gmail.com

Abstract

As a newly independent country, Sukarno as Indonesian president had a big plan to develop Indonesia, namely to build economic, politic, and governmental infrastructure independently. One way to take was both developing human resource capabilities and creating a new potential generation among Indonesian students by sending them to study in the developed countries. However, the imagined dream had disappeared along with the events of 1965-1966 which marked by the movement of September 30, 1965. This paper focuses on pre and post of the 1965-1966 events by raising two questions; how was Indonesia being imagined by the Sukarno presidency within the context of foreign policy in the Cold War era by sending the Indonesian students for studying overseas? What was the impact of the 1965-1966 events that they were facing? This article shows that the event of 1965-1966 does not only break a dream that imagined by Sukarno, but also causes the emergence of Indonesian exiles community that had been finally forced them to become a stateless citizen. Although they are no longer Indonesian citizen, both of their memory and social activities of Indonesia have been still so strong up to now. In the term of Benedict Anderson's words, they are well-known as community of long-distance nationalism.

Kata kunci: Sukarno, the 1965-1966 tragedy, exiles, long distance nationalism

Abstrak

Sebagai sebuah negara yang baru saja merdeka, Presiden Sukarno memiliki rencana besar dalam membangun Indonesia, yaitu membangun kemandirian ekonomi, politik, dan infrastruktur pemerintahan. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan menciptakan generasi baru yang potensial dengan menyekolahkan putera-puteri terbaik Indonesia ke negara-negara maju. Namun, rencana itu hilang dan imajinasi yang dibayangkan lenyap seiring dengan adanya peristiwa 1965-1966 yang ditandai dengan adanya Gerakan 30 September 1965. Tulisan ini memfokuskan pada pra dan pasca peristiwa 1965-1966 dengan mempertanyakan dua hal yang saling terkait; bagaimana Indonesia yang dibayangkan oleh Sukarno melalui pemerintahannya dalam konteks politik luar negeri di era perang dingin terkait dengan pengiriman mahasiswa dan mahasiswi Indonesia ke luar negeri? Apa dampak peristiwa 1965-1966 kepada mahasiswa dan mahasiswi Indonesia, baik karena tugas belajar ataupun kunjungan kebudayaan di luar negeri? Artikel ini menunjukkan bahwa peristiwa 1965-1966 tidak hanya menghancurkan imajinasi yang dibayangkan oleh Sukarno mengenai Indonesia, terkait dengan pengiriman putera-puteri terbaik bangsa, tetapi hal itu berakibat juga pada kemunculan eksil Indonesia di luar negeri yang membuat mereka menjadi warga negara tanpa negara (*stateless*). Meskipun tidak lagi menjadi warga negara Indonesia, ingatan dan aktivitas sosialnya tentang Indonesia Indonesia masih begitu kuat. Mereka inilah yang diistilahkan oleh Benedict Anderson (1994) sebagai komunitas nasionalisme jarak jauh (*long-distance nationalism*).

Kata Kunci: Sukarno, peristiwa 1965-1966, eksil, nasionalisme jarak jauh

¹Bahan-bahan dari tulisan ini diambil dari DIPA Riset Pusat Studi Sumber Daya Regional (PSDR) LIPI Tahun 2013 dengan judul "Eksil Indonesia di Belanda", yang dikoordinatori oleh Amin Mudzakir.

Pendahuluan

Pada tahun 2012 dan awal 2013 ada dua peristiwa penting saling terkait yang perlu untuk diperhatikan berhubungan dengan kondisi masa lalu dan masa depan Indonesia yang dibayangkan. Pertama, dikeluarkannya tiga dokumen penting mengenai peristiwa 1965-1966 yang mengakibatkan 500 ribu sampai 1 Jutaan korban meninggal, baik orang PKI dan di-PKI-kan. Tiga dokumen itu adalah: (1) Laporan temuan lapangan Komnas HAM mengenai kekerasan yang terjadi kurun waktu 1965-1966, (2) Diluncurkannya film dokumentasi mengenai peristiwa 1965-1966 perspektif pelaku, *the Act of Killing*, disutradarai oleh Joshua Lincoln Oppenheimer, dan (3) Liputan investigasi *Tempo* mengenai para jagal peristiwa 1965-1966; satu usaha lanjutan upaya pengungkapan kebenaran atas film *the Act of Killing*. Selain itu, para sarjana Indonesia dan internasional yang menaruh minat mengenai studi Indonesia mengadakan konferensi di Australia, tepatnya di ANU (Australian National University), Canberra, pada 11-13 Februari 2013 dengan tema “New Perspectives on the 1965 Violence in Indonesia”. Selain merupakan respon terhadap *the Act of Killing*, konferensi tersebut melakukan sistematika data dan kajian peristiwa 1965-1966 serta mendiskusikan tujuan kegunaan kelanjutan posisi data tersebut, apakah sekedar disimpan atau dilanjutkan sebagai sebuah proyek kembali untuk melakukan advokasi akademik.

Kedua, pemerintah, digerakkan oleh Dino Patti Jalal, Duta Besar RI Amerika Serikat mengadakan *Congress of Indonesia Diaspora* (CID), bertempat di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 6-8 Juli 2012. Selain menghimpun ‘mutiara yang berserakan’ di pelbagai negara, tujuan kongres tersebut adalah membentuk “suatu komunitas besar (Indonesia) dan membangun kekuatan yang riil”, sehingga diharapkan akan memunculkan “gelombang *networking* yang akan mempererat tali persahabatan dan semangat kebersamaan di antara kelompok-kelompok diaspora Indonesia”. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh Dino Patti Jalal terkait dengan tujuan kongres tersebut, yaitu dapat memunculkan kesadaran dan kebanggaan kolektif sebagai komunitas diaspora Indonesia yang dinamis. Lebih jauh, Dia berharap, “dengan idealisme dan *intellectual resources* yang begitu besar, diaspora

Indonesia dapat menjadi lokomotif bagi kejayaan Indonesia di masa mendatang”. Kongres ini dihadiri lebih dari 2000 orang perwakilan diaspora Indonesia dari 21 negara. Hasil dari kongres tersebut dideklarasikannya “Indonesia Diaspora” yang dianggap sebagai “visi segar” dalam membangun Indonesia ke depan melalui kehadiran mereka dengan memberikan wadah pemersatu. Kongress tersebut dilanjutkan pada kongres Diaspora II, bertema “Pulang Kampung”, di Jakarta pada 17-21 Agustus 2013 dengan menghadirkan tokoh-tokoh penting dari beragam profesi yang telah sukses dan berpengaruh di dalam dan luar negeri (Patti Djalal, 2012; www.indonesiandiaspora.com.au, 2013).

Kejadian pertama merupakan perjuangan lanjutan yang pernah dilakukan pemerintah di bawah Abdurahman Wahid (Gusdur) untuk ‘mematahkan kekerasan masa lalu’ dengan menengok peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Menurut Ariel Heryanto (2012: 118), Hilmar Farid (2005, 2007, 2010, 2013), dan Roosa (2012), peristiwa tersebut merupakan titik berangkat mengapa masyarakat Indonesia memiliki ‘watak’ seperti ini. Misalnya, kekerasan yang berulang, militansi kebencian terhadap yang lain, normalisasi kejahatan, ekspansi dan munculnya kapitalisme, masifnya korupsi melalui dinasti politik, hancurnya gerakan berbasis perjuangan kelas, hilangnya teori kelas, dan perubahan drastis bangsa Indonesia dari sikap anticolonialisme menuju antikomunisme. Sementara kejadian kedua membayangkan Indonesia ke depan dengan merangkul dan membangun jaringan orang Indonesia di pelbagai negara yang memiliki beragam latar belakang tanpa tersekat etnis, warna kulit, dan warga negara. Diaspora ini dianggap sebagai sumber daya manusia kompetitif, dapat memberikan manfaat untuk kemajuan Indonesia. Ironisnya, pembayangan mengenai diaspora ini tidak melibatkan dan minimal membicarakan komunitas eksil Indonesia di luar negeri yang kehilangan kewarganegaraan saat terjadi Gerakan 30 September dengan dicabutnya paspor mereka. Selain berangkat ke luar negeri diutus presiden Sukarno menghadiri acara kebudayaan dan sosial di luar negeri, ada juga komunitas eksil yang dikirim belajar dalam program Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) dan calon pegawai negeri sipil (Duta Ampera) ke

negara-negara sahabat, seperti China, Uni Soviet, dan Eropa Timur (Warman Adam, 2011: 119). Mereka inilah diaspora pertama setelah terbentuknya negara Republik Indonesia. Mereka ini yang dibayangkan dapat memberikan kontribusi untuk Indonesia setelah kembali dari tempaan pendidikan di luar negeri. Kedua kejadian yang saling terkait tersebut seakan mengalami keterputusan sejarah – untuk tidak mengatakan penyangkalan atas peristiwa tersebut – dalam mendiskusikan mengenai dan menjadi Indonesia saat ini serta yang akan datang.

Artikel ini menjelaskan Indonesia yang diandaikan pada masa Sukarno. Namun, pengandaian ini sirna seiring dengan adanya peristiwa 1965-1966 yang ditandai dengan adanya Gerakan 30 September 1965. Artikel ini terdiri dari empat bagian dengan memfokuskan pada peristiwa 1965-1966 sebagai akibat. *Pertama*, Indonesia yang diandaikan oleh Sukarno melalui pemerintahannya dengan mengkaji konteks politik luar negeri di era perang dingin terkait dengan pengiriman mahasiswa dan mahasiswi Indonesia ke luar negeri. *Kedua*, peristiwa 1965 dan dampaknya kepada mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar di luar negeri yang mengakibatkan munculnya eksil Indonesia. *Ketiga*, Nasionalisme Jarak Jauh, dengan memfokuskan kepada aktivisme sosial yang dilakukan oleh komunitas Eksil Indonesia. *Keempat*, kesimpulan, yang berisi hasil keseluruhan pembahasan.

Sukarno, Hubungan Luar Negeri, dan Tugas Belajar

Menurut saya, bagi negara yang baru saja lepas dari negara bekas jajahan ataupun pascaperang, membangun kemandirian ekonomi, politik, dan infrastruktur pemerintahan menjadi hal penting. Ada dua cara yang dapat ditempuh. *Pertama*, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan menciptakan generasi baru yang potensial dengan menyekolahkan putera-puteri terbaik mereka ke negara-negara maju. Selain itu, bisa juga dengan mengirimkan intelektual publik, pemegang kebijakan, dan tenaga praktisi dengan melakukan kunjungan singkat. Kunjungan singkat ini diartikan dua hal, menguatkan hubungan baik sebagai bentuk diplomasi dan media belajar atas kemajuan serta perkembangan yang sudah dilakukan oleh negara yang dikunjungi. *Kedua*,

membangun relasi di kancah internasional dengan bekerjasama dengan negara lain, baik itu negara tetangga, maju, ataupun berpengaruh. Hal itu perlu dilakukan karena kedaulatan ekonomi dan teritorial negara membutuhkan pengakuan negara-negara lain, dijalin dengan kerjasama dalam pelbagai bidang. Tentu saja, melakukan pemosisian diri terkait dengan eksistensi sebuah negara menjadi penting dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar dalam bernegosiasi dengan negara-negara lain.

Dua hal ini dilakukan oleh Sukarno dalam membangun Indonesia ke depan. Selain terinspirasi dengan sukses Jepang pasca perang tahun 1945, menciptakan manusia-manusia yang potensial dan mumpuni di bidangnya masing-masing dengan mengirimkan mereka belajar ke luar negeri ini dilandasi oleh cita-cita proklamasi dan keinginan menjadi bangsa yang besar. Ini dicanangkan oleh Presiden Sukarno dengan Dekritnya yang disebut Manipol USDEK (Manifestasi Politik UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia) (lihat Budiawan, 2013). Terkait dengan poin keempat, yakni Ekonomi Terpimpin, Sukarno menjabarkannya sebagai suatu cita-cita Indonesia sekian puluh tahun ke depan, yaitu Indonesia dengan ekonomi berdikari, yang sanggup mengolah segala bahan mentah – baik hasil tambang maupun pertanian dan perkebunan – yang ada di bumi Indonesia (Budiawan, 2013). Analisis kebutuhan prioritas bangsa ini kemudian disusun dalam Kabinet Hatta II pada tahun 1949 sampai kabinet Djuanda, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1959, menyajikan cetak biru komprehensif dan terjadwal mengenai apa dan bagaimana meraih cita-cita bangsa. Muara dari semua itu adalah kebutuhan menyiapkan manusia unggul di semua lini untuk mengolah sumber daya alam dan modal berharga. Tujuannya adalah kedaulatan politik dan ekonomi (Suwidi Tono, 2012).

Melakukan dua hal tersebut tidaklah mudah di tengah situasi perang dingin yang membelah dunia internasional menjadi dua kubu, Kapitalis Barat dan Sosialis Timur. Kapitalis Barat direpresentasikan oleh Amerika Serikat, mendukung ekonomi pasar liberal. Sosialis Timur didukung dengan ideologi komunis, direpresentasikan oleh

Uni Soviet dan Cina. Memilih pada salah satu kubu tersebut akan menyulitkan posisi Indonesia sebagai negara yang baru berdiri di tengah upaya legitimasi politik di antara negara-negara lain. Tidak memilih salah satu dari kubu tersebut membuat Indonesia akan dipertanyakan terkait dengan sikap politiknya. Sikap ini juga akan membuatnya tidak mendapatkan apa-apa. Di sini kecerdikan Indonesia di bawah Sukarno terlihat. Ia tidak memilih salah satunya, melainkan memainkan posisi di antara keduanya untuk tujuan pragmatis, mendapatkan bantuan asing untuk kepentingan Indonesia. Apalagi, saat itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi partai terbesar ketiga setelah negara Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi rebutan di antara kedua kubu tersebut. Sikap politik internasional Indonesia yang tak berpihak ini dikenal dengan “bebas aktif”. Selain itu, peranan Sukarno membangun kekuatan baru dengan merangkul sejumlah negara di Asia (India, Myanmar, Vietnam) dan Afrika (Mesir), dikenal dengan NEFO (New Emerging Forces), yang memiliki semangat antikolonial dan imperialisme di tengah dua kubu tersebut, semakin membuat Indonesia menjadi negara baru yang harus dipertimbangkan.

Karena itu, sebagaimana dicatat oleh Lindsay (2012: 9), selama tahun 1950-an, Indonesia membuka misi diplomatik dengan melakukan kunjungan ke pelbagai negara, seperti Amerika Serikat, RRC (Republik Rakyat China), Jepang, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Hasil dari kunjungan tersebut adalah banyaknya putera-puteri Indonesia yang dikirim belajar keluar negeri. Misalnya, kunjungan pertama Sukarno ke Uni Soviet tahun 1956 menghasilkan pengiriman tujuh mahasiswa pertama ke Moskwa. Hasil dari kunjungan balasan Nikita S. Khrushchev, Sekretaris Jenderal pertama Partai Komunis Soviet Bersatu dan Perdana Menteri Uni Soviet, dibukanya kesempatan beasiswa kepada masyarakat Indonesia pada Februari-Maret 1960. Sejak tahun 1960, banyak mahasiswa Indonesia yang dikirim belajar ke Uni Soviet. Perjanjian antar organisasi massa, partai, dan institusi lain termasuk militer, menambah jumlah orang Indonesia yang dikirim belajar. Jumlah seluruhnya sekitar 2.000 orang (Supartono dan Rahman, 2001; Lebang dan Susanto, 2010: 21; Hill, 2010: 28). Sementara itu,

hasil dari kerjasama diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat adalah pertukaran pelajar dan kunjungan budaya, yaitu dengan memberikan beasiswa, didanai oleh Ford Foundation pada tahun 1957 kepada mahasiswa jurusan ekonomi. Kebanyakan mereka dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, belajar di Universitas Berkeley (Hill, 2010: 27).

Meskipun tidak sebanyak di Uni Soviet, pemerintah juga mengirimkan mahasiswa ke RRC, baik itu untuk menjadi guru bahasa Indonesia ataupun mahasiswa untuk belajar bahasa Cina. Diakui, awalnya pengiriman mereka ini lebih karena kedekatan jaringan PKI dengan Republik Rakyat Cina. Di antara mereka yang terkenal adalah Sobron Aidit, adik dari DN Aidit, Ketua PKI. Sobron Aidit lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia pernah mengajar di sekolah yang kebanyakan muridnya adalah Tionghoa-Indonesia. Setelah bergabung dengan PKI pada tahun 1957 dan organisasi kebudayaan LEKRA di tahun-tahun berikutnya, ia aktif di lembaga bersahabatan Indonesia-Cina. Pada tahun 1964, ia dikirim ke Cina untuk tidak hanya belajar, melainkan juga diminta mengajar bahasa Indonesia dan sastra di lembaga bahasa asing di Beijing. Sementara itu, di Universitas Peking, sudah ada Bakri Siregar, ahli sastra dan sejarawan yang mengajar bahasa Indonesia. Ia kemudian digantikan oleh FL Risakotta dan Kamaluddin pada September 1965. Bertolak dari sini, melalui kedutaan yang berada di Jakarta dan Jurnalis bahasa Asing di Cina, pemerintah Cina mempromosikan citra positif mengenai negaranya. Melalui kedutaan Cina di Jakarta, ada lebih dari dua belas orang muda Indonesia mendapatkan beasiswa. Kebanyakan mereka yang berasal dari beberapa kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Pendidikan yang diwakilkan oleh Samardji dari Purwarkata. Ia ditugaskan pada tahun 1964 untuk belajar kurikulum pendidikan anak. Di sisi lain, ada banyak dari anggota PKI dan juga aktivisi kebudayaan LEKRA yang melakukan kunjungan ke Cina (Hill, 2010: 28-29).

Uni Soviet, Amerika Serikat, dan RRC bukanlah satu-satunya negara tujuan pengiriman mahasiswa oleh pemerintah Indonesia. Meskipun jumlahnya tidak banyak, ada beberapa orang yang dikirim untuk belajar ke negara-negara sosialis Eropa Timur, Asia, dan Timur Tengah, seperti

Albania, Hungaria, Rumania, Cekoslovakia, Vietnam, Korea Utara, dan Mesir. Jumlah kasarnya, sebagaimana disebutkan David Hill (2010: 30), 40 orang mendapatkan beasiswa di Albania dan puluhan di Rumania, 30 pilihan studi di antaranya adalah bidang ekonomi, kedokteran, dan perminyakan. Meskipun mereka mendapatkan beasiswa dari negara tempat mereka belajar, mereka harus membuat komitmen kesetiaan terhadap Negara Republik Indonesia. Bentuk komitmen tersebut adalah dengan menandatangani kontrak sebagai bagian dari MAHID. Hal ini dijelaskan oleh Koesalah Subagya Toer ketika mengisahkan pengalamannya menjadi mahasiswa di Uni Soviet:

Walaupun biaya belajar mahasiswa Indonesia di Uni Soviet ditanggung oleh pemerintah Uni Soviet, mahasiswa Indonesia diharuskan menandatangani ikatan dinas dengan pemerintah. Mereka diminta untuk memenuhi delapan janji: (I) bahwa saya akan tetap setia kepada Kepala Negara Republik Indonesia; (II) bahwa saya akan tetap setia kepada Pemerintah Republik Indonesia; (III) bahwa saya akan tetap setia kepada Pancasila sebagai falsafah negara; dan USDEK beserta manifesto politik sebagai haluan negara; (IV) bahwa saya senantiasa akan berusaha untuk dapat menyelesaikan pelajaran-pelajaran sesuai dengan waktu yang ditetapkan untuk pelajaran itu; (VI) bahwa saya bersedia bekerja pada pemerintah Republik Indonesia menurut ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku; (VII) bahwa saya tidak akan berbuat apapun yang dapat mencemarkan nama Negara dan Bangsa Indonesia; (VIII) bahwa saya bersedia menerima tindakan-tindakan dari pemerintah Republik Indonesia apabila saya melanggar janji tersebut di atas. Secara populer janji-janji itu dapat dijabarkan dengan kalimat “selesai belajar mahasiswa harus bekerja pada pemerintah selama dua kali masa belajar (5 atau 6 tahun) ditambah 1 tahun, ditambah lagi tugas kerja sarjana selama 3 tahun, artinya (*total jumlah keseluruhan*) 14-15 tahun (Subagya Toer, 2006: XVIII).²

Berangkat dari penjelasan di atas, satu hal yang dapat disimpulkan bahwa Indonesia yang

diandaikan Sukarno adalah menyiapkan generasi manusia Indonesia yang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan menyekolahkan mereka ke luar negeri. Tujuannya, sebagaimana dijelaskan di atas, Indonesia yang berdikari dengan kekuatan politik dan kemandirian ekonomi. Di tengah situasi yang baru merdeka, biaya adalah persoalan besar. Namun, dengan kelihaihan diplomasi internasional Sukarno di tengah terbelahnya dunia internasional ke dalam dua kubu dan upaya merangkul kekuatan baru untuk menandingi dua kubu tersebut sangat memungkinkan bagi Indonesia mendapatkan keuntungan material. Diakui, di tengah usaha itu, dalam konteks nasional, Sukarno menghadapi persoalan internal. Misalnya, lemahnya pertumbuhan ekonomi, isu kemiskinan, adanya gerakan kemerdekaan di Maluku, Sumatera, Jawa Barat, adanya ketidakstabilan sistem parlementer, dan ketidakpuasan militer atas kecenderungan presiden Sukarno yang berpihak kepada PKI. Sementara PKI sendiri telah menjadi besar yang memiliki kekuatan politik. Naiknya peraihan suara PKI ke dalam golongan empat partai terbesar dalam pemilu tahun 1955 ini mengkhawatirkan partai-partai Islam yang sebelumnya juga memiliki riak konflik di daerah (Hill, 2010: 26; Sipayung, 2011: 14).

Untuk mengatasi persoalan rivalitas politik dan upaya penguatan sistem pemerintahan, pada 5 Juli 1959, Sukarno mengeluarkan doktrin dengan membangun demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan eksekutif langsung berada di tangannya. Meskipun ketegangan politik antara partai-partai Islam, militer, dan PKI masih terus terjadi. Puncaknya peristiwa 1965-1966, ditandai dengan adanya gerakan 30 September 1965 (Roosa, 2008). Peristiwa tersebut mengubah lanskap bangunan Indonesia yang dibayangkan oleh pemerintahan Sukarno dan wajah politik internasional Indonesia. Di bawah kontrol Suharto yang mengambil alih kepemimpinan Sukarno melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), apapun yang terkait dengan Sukarno dan gerakan kiri telah dilucuti. Suharto membekukan hubungan yang sudah terjalin baik antara Indonesia dan Cina di tengah rivalitas antara memilih Cina atau Uni Soviet. Sebaliknya, ia menggantungkan nasibnya kepada Amerika Serikat dan Barat dengan

²Dalam menjelaskan 8 janji ini, Koesalah Subagya Toer tidak menyebutkan janji yang kelima (v). Sementara, dua kalimat yang bergaris miring tersebut merupakan tambahan penguat dari saya.

meminta bantuan dana luar negeri dan pertolongan militer. Ia juga menginstruksikan para diplomat yang ditunjuk oleh Sukarno untuk balik ke Indonesia. Namun, para diplomat yang loyal terhadap Sukarno tidak mau kembali dan menuruti keinginan Suharto. Bertolak dari sini imajinasi mengenai Indonesia yang dibayangkan oleh Sukarno dengan mencetak generasi manusia Indonesia yang dapat diandalkan sirna seiring dengan adanya kebijakan otoriter, diskriminatif, dan sewenang-wenang di bawah rezim politik Suharto yang sedang membangun kekuatan politiknya dengan cara membersihkan orang-orang yang dekat dan loyal kepada Sukarno dan PKI serta organisasi yang terkait dengannya.

Kemunculan Eksil Indonesia

Sebenarnya, terma peristiwa 1965-1966 merujuk atas apa yang terjadi pada 30 September 1965. Menurut versi resmi rezim Suharto, peristiwa tersebut adalah upaya kudeta gagal yang dilakukan oleh PKI. PKI-lah yang selama ini menjadi dalang penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan satu letnan dalam peristiwa 1 Oktober 1965 dini hari. Tindakan itu dilakukan untuk mengontrol militer Indonesia, sebelum mereka menguasai negara. Narasi ini berdasarkan “bukti-bukti terpercaya” dari petinggi PKI dan mereka yang terlibat dalam gerakan 30 September. Gerakan itu, masih menurut rezim Suharto, merupakan usaha puncak PKI untuk mengganti ideologi Pancasila dan UUD dengan ideologi komunis. Berkat kerja keras militer Angkatan Darat dengan strategi Pangkostrad, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto, tindakan makar itu dapat digagalkan. Pancasila dan UUD 1945 pun tetap berdiri tegak. Selama rezim Orde Baru berkuasa, narasi ini menjadi kebenaran sejarah. Pengungkapan kebenaran atas gerakan tersebut ditutup (Budiawan, 2012: 273).

Sementara itu, kampanye militer dalam mengebiri PKI dan organisasi-organisasi yang terkait dengannya ‘sampai ke akar-akarnya’ selama akhir tahun 1965 sampai pertengahan tahun 1966 menjadi narasi yang bungkam. Pada periode itu, kurang lebih ada 500 ribu-1 juta orang Indonesia yang berafiliasi dengan PKI dan di-PKI-kan telah dibunuh, baik oleh kalangan militer, paramiliter, dan masyarakat sipil yang didukung oleh militer. Lebih dari 1 juta orang di penjara

tanpa adanya peradilan. Durasi lamanya dipenjara ini beragam, tergantung dari tingkat atau beratnya tuduhan yang diajukan, mulai dari beberapa tahun hingga 20an tahun lebih. Mereka yang di penjara ini masuk dalam tiga kelompok kategori, C, B, dan A. Kurang lebih ada 1, 375,320 orang yang dikategorikan sebagai kelompok C. Mereka dianggap terkait langsung dengan PKI dan organisasi yang terkait dengannya, dan di penjara selama 10 tahun. Kelompok B adalah mereka yang diindikasikan memiliki kaitan dengan Gerakan 30 September. Jumlahnya sekitar 34,587 orang, termasuk di dalamnya 10 ribu orang yang dibuang ke Pulau Buru. Kelompok A berjumlah 426 orang. Mereka ini yang dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September dan menghabiskan sisa hidupnya di penjara (Budiawan, 2012: 274).

Meskipun tidak terjadi penangkapan, pemenjaraan, dan penyiksaan, peristiwa tersebut juga memberikan dampak besar kepada mahasiswa dan mahasiswi Indonesia ataupun mereka yang sedang menjalani pelatihan dan pertukaran budaya di luar negeri. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang tinggal di Uni Soviet, misalnya, Gerakan 30 September 1965 telah menciptakan perasaan *kalut* dan rasa takut di antara mereka. Hal ini ditambahkan dengan tidak adanya informasi sedikitpun yang diberikan oleh Kedutaan Indonesia di Moscow terkait dengan apa yang terjadi di Jakarta pada 30 September 1965 tersebut. Mereka hanya mendapatkan informasi dari dua sumber yang sangat terbatas. *Pertama*, informasi yang didapatkan dari Jenderal Suhario Padmowidiry, dikenal sebagai Hario Kecik, mantan Komandan Militer Region Kalimantan yang ditugaskan oleh Presiden Sukarno untuk melakukan studi di Soviet War College. Informasi yang ia dapatkan dari kantor atase militer Indonesia, yaitu Jenderal Harun Sohar, mengatakan bahwa sesuatu yang serius telah terjadi di Jakarta, di mana Jenderal Ahmad Yani dan beberapa jenderal yang lainnya telah hilang. *Kedua*, laporan radio berita asing yang mengatakan bahwa di Indonesia sedang terjadi pemberontakan. Informasi lebih jelas baru mereka dapatkan sebelum 17 Oktober dari Koran harian *Izvestia* yang menjelaskan analisis detail mengenai kudeta dan munculnya gerakan antikomunis di Indonesia (Hill, 2014: 628-629).

Pada 7 Mei 1966, diwakili Menteri Pendidikan Indonesia, Suharto mengeluarkan instruksi kepada mahasiswa Indonesia, intelektual publik, dan budayawan yang sedang melakukan kunjungan di luar negeri untuk menjalani pemeriksaan dan pernyataan loyalitas terhadap kepada pemerintah baru, yaitu Orde Baru di bawah Suharto. Metode pemeriksaan ini diumumkan Menteri Luar Negeri. Jika menolak, mereka hanya mendapatkan stempel ijin sekali pulang ke Indonesia. Akibatnya, jika menolak memberikan paspor atau masanya sudah habis, mereka tidak dapat kembali ke Indonesia dan kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Karena ketidaktahuan sistem baru ini dan juga upaya untuk menuntaskan studi mereka sampai selesai telah mengakibatkan orang Indonesia di luar negeri kehilangan kewarganegaraan mereka. Meskipun, banyak juga, karena sikap politik yang berpihak kepada Sukarno dan menjadi pengurus PKI luar negeri, mereka menolak pemeriksaan tersebut. Alasan penolakan tersebut adalah karena Orde Baru telah melakukan kudeta kepada pemerintahan yang sah (Hill, 2010: 31-32). Penolakan ini juga datang dari Duta Besar Indonesia yang memiliki loyalitas dengan Sukarno. Di antara mereka adalah Suraedi Tahsin, Duta Besar Indonesia di Mali, Afrika Barat, yang kemudian pindah di Paris bersama keluarganya sebelum pindah ke RRC pada Oktober 1967; AM Hanafi, Duta Besar Indonesia untuk Kuba, yang kemudian bermigrasi ke Paris, Perancis; dan Ali Chanafiah, Duta Besar Indonesia untuk Srilangka yang mendapatkan suaka di Uni Soviet sebelum pindah ke Swedia (Hill, 2010: 31).

Sikap politik orang Indonesia di luar negeri ini tidak berhenti sekedar pada penolakan, mereka juga membuat gerakan untuk mengancam keras kebijakan pencabutan paspor tersebut. Dalam konteks mahasiswa dan mahasiswa Indonesia yang berada di Uni Soviet, mereka membangun gerakan untuk mengancam keras kebijakan paspor tersebut dengan nama Gerakan Mahasiswa Revolusioner (GEMAREV) dan Gerakan Pembela Ajaran Sukarno (GPAS). Dalam gerakan tersebut, mereka membuat buletin, poster, dan pamflet yang terbitkan dalam bahasa Inggris dan Rusia untuk menunjukkan sikap anti Orde Baru, dan mengkritik organisasi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dan Atase Militer Indonesia yang

berpihak kepada Suharto. Tidak berhenti di sini, mereka juga melakukan aksi demonstrasi di bandara sebagai bentuk sambutan kepada Adam Malik, mantan Kedubes Uni Soviet (1960-1964) Menteri Luar Negeri yang dipilih oleh Suharto. Sebenarnya, kedatangan Adam Malik pada 18 Oktober 1966 adalah untuk menegosiasikan penanggungan peminjaman uang sejumlah US \$ 40 juta (Hill, 2014: 632).

Sikap politik ini harus dibayar mahal dengan kehilangan paspor mereka yang berarti tercabutnya identitas mereka sebagai warga negara Indonesia dan hak-hak yang dimiliki yang membuat mereka tidak bisa kembali ke Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Barton (2002: 89-90) yang dikutip oleh Hearman (2010: 86), dengan menjelaskan kondisi yang terjadi di Mesir sewaktu Gusdur kuliah dan bekerja paruh waktu, “ketika kuliah dan bekerja paruh waktu di Kedutaan Indonesia di Kairo antara tahun 1965-1966, Gusdur mendapatkan salah satu tugas untuk melaporkan proses pemeriksaan mahasiswa Indonesia”. Menurut Gusdur, mereka yang mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan dengan menunjukkan sikap antimiliter dan tampak mendukung PKI mengakibatkan mereka kehilangan paspor dan haknya untuk kembali ke Indonesia. Bahkan, mereka yang tidak cukup membuktikan loyalitasnya kepada pemerintah di bawah kendali Suharto mendapatkan nasib yang serupa. Kondisi ini membuat mereka hidup tanpa naungan negara asal (*stateless*) dalam belantara negeri-negeri asing tempat mereka belajar. Mereka hidup dalam batas liminal, antara Indonesia yang mereka bayangkan dengan pelbagai keistimewaan hak-hak yang dimiliki dan negara yang kini mereka tinggali tanpa adanya kejelasan dokumen terkait dengan kewarganegaraan formal yang dimiliki dan mobilitas terbatas yang harus mereka hadapi.

Mereka melalui tahun-tahun pertama sebagai *stateless* dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak dari mereka tidak memiliki uang karena beasiswa terputus dari pemerintah Indonesia dan/lembaga donor yang memberikan beasiswa di tengah ketidakpastian perlindungan di negara tempat mereka belajar dan situasi sosial politik negara tersebut. Di antara mereka, tidak sedikit yang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan lainnya dalam menghadapi kesulitan yang tidak pernah mereka bayangkan

sebelumnya. Di sisi lain, mencari suaka dari satu negara ke negara yang lain bukanlah perkara yang mudah. Namun, adanya ikatan rasa keindonesiaan yang kuat dan solidaritas sesama “korban rezim Orde Baru” membuat mereka yang tersebar di pelbagai negara sosialis-komunis membentuk kelompok dan bermigrasi ke negara-negara Eropa Barat, termasuk Belanda, ketika komunisme menunjukkan tanda-tanda keruntuhannya (Mudzakkir, 2013). Ada juga beberapa eksil tersebut yang kemudian pindah dari RRC dan menetap di Kuba (Hearman, 2010). Di tempat itulah mereka membangun kehidupan baru. Mereka mendaftarkan diri untuk menjadi warga negara setempat, menikah, dan mendapatkan pekerjaan yang layak seperti warga negara lainnya.

Kehidupan baru dan identitas yang dimiliki tidak menyurutkan perhatiannya terhadap negara asal di mana tempat mereka lahir, tumbuh, dan dibesarkan. Dengan segenap cara mereka tetap aktif membangun komunikasi, baik di antara mereka atau dengan sejawat lain yang mempunyai perhatian terhadap situasi di Indonesia. Selain isu politik dan sosial, mereka juga aktif mendiskusikan aktivitas yang terkait dengan seni. Banyak di antara mereka kemudian membuat karya sastra, seperti cerpen, novel, dan puisi. Karya sastra mereka berkembang pesat sehingga membentuk sebuah genre tersendiri dalam dunia sastra Indonesia (Alex Suparsono, 2001). Mereka inilah yang disebut eksil atau terkenal dengan eksil 1965. Abdurahman Wahid (Gusdur) menyebutnya *orang kelayapan*. Lebih tepatnya, Gusdur menjelaskan mereka sebagai ‘anak bangsa yang menjadi korban rezim Orde Baru yang terpaksa kelayapan di manca negara’. Istilah *orang kelayapan* ini tidak disetujui oleh anggota eksil Indonesia di luar negeri. Selain tidak tepat, kebanyakan mereka yang menjadi eksil adalah orang yang dicegah untuk kembali ke Indonesia, bukan orang yang mengembara atau *kelayapan* ke satu negara ke negara lain tanpa tujuan yang jelas dan tidak ingin kembali (Sipayung, 2011: 15).

Perlu diakui, eksil 1965 ini berbeda dengan orang-orang Indonesia umumnya yang berpindah warga negara (*Indonesian migrant*). Meskipun di atas catatan formal kantor imigrasi mereka sama-sama berpindah dan menjadi warga negara di negara tempat mereka kini tinggal.

Perbedaan terbesar antara eksil dengan orang Indonesia yang berpindah warga negara, menurut Sipayung (2011: 15-16), ada dua alasan. *Pertama*, alih-alih kepindahan mereka ke negara-negara tertentu karena alasan sosial dan ekonomi, sebagaimana terjadi kepada orang-orang Indonesia pada tahun 1970-an, ataupun menikah dengan warga negara asing, kepindahan eksil 1965 ini disebabkan persoalan politik yang terjadi di Indonesia. *Kedua*, meskipun sama-sama menghadapi persoalan politik di Indonesia, eksil 1965 ini tidak bisa disamakan dengan eksil politik orang Maluku, Papua, dan Aceh di Swedia. Eksil politik tersebut pindah menjadi warga negara di mana mereka tinggal itu disebabkan karena orientasi politik mereka yang menginginkan merdeka dan pisah dari Indonesia. Perihal politik ini terkait erat dengan warisan geopolitik kolonial Belanda. Sementara, eksil 1965 ini adalah mereka yang memiliki visi kuat tentang Indonesia dengan bayangan sebelum adanya peristiwa 1965 akan balik tanah air dan membangun Indonesia. Dengan kata lain, eksil 1965 ini adalah kelompok yang memiliki identitas nasionalisme yang kuat dengan campuran latar belakang ideologi sosialis dan komunis mengenai Indonesia.

Nasionalisme Jarak Jauh

Meskipun tidak lagi menjadi warga negara Indonesia, ingatan dan rasa nasionalisme kebanyakan eksil Indonesia masih cukup kuat. Ini terlihat dengan aktivitas sosial yang mereka lakukan terkait dengan isu keindonesiaan, baik itu persoalan peristiwa 1965-1966, HAM, ataupun persoalan sosial lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Amin Mudzakkir (2013) mengenai komunitas Eksil di Belanda. Menurutnya, komunitas eksil tersebut mendirikan organisasi bernama Yayasan Sapu Lidi, berbasis di Leiden. Organisasi yang bekerja sama dengan mahasiswa/mahasiswi Indonesia di Belanda tersebut didirikan oleh Mintarjo, salah seorang eksil yang dahulu mahasiswa Indonesia yang dikirim oleh Sukarno melalui program MAHID ke Rumania pada awal tahun 1960-an. Ia menikah dengan perempuan Rumania. Pada tahun 1980-an, ia pindah dan menjadi warga negara Belanda. Di rumahnya inilah aktivitas sosial sering dilakukan bersama-sama, baik oleh eksil maupun mahasiswa Indonesia, mulai dari sekedar berbincang-bincang

hingga melakukan diskusi rutin dengan tema sosial politik di Indonesia. Rumahnya juga menjadi persinggahan untuk orang-orang Indonesia yang sedang melakukan riset ataupun perjalanan pendek ke Belanda. Sementara itu, Samardji, eksil Indonesia di Belanda lainnya, membangun perpustakaan Perhimpunan Dokumentasi Indonesia (PERDOI) di rumahnya, terletak di pinggiran Amsterdam. Dalam perpustakaan tersebut tidak hanya terdapat buku-buku sejarah tentang Indonesia, khususnya peristiwa 1965-1966, melainkan juga obituari dan catatan tentang eksil yang sudah meninggal. Alih-alih sebagai penyaluran bakat dan minat, bagi Samardji membangun dan mengelola PERDOI adalah bentuk monumen kehilangan sekaligus perlawanan terhadap hegemoni rezim Orde Baru dalam pelbagai hal, khususnya dalam bidang sejarah yang telah diselewengkan. Lebih jauh, menurut Sumardji, segala usaha untuk membangun ulang Indonesia harus dimulai dengan pelurusan sejarah. Ini dilakukan tidak hanya untuk korban peristiwa 1965-1966, melainkan juga untuk anak-anak muda Indonesia. Apalagi jumlah para korban sebagai saksi hidup atas peristiwa kelam tersebut satu per satu telah meninggal (Mudzakkir, 2013).

Melalui inisiatif Umar Said, Sobron Aidit, J.J Kusni, dan Budiman Shudarsono – dengan dibantu oleh empat orang warga Perancis – komunitas eksil ini mendirikan Restoran Koperasi Indonesia di Paris, Perancis pada tahun 1982. Pengelolaan Restoran tersebut menggunakan sistem berbasis model koperasi atau yang lebih dikenal dengan Société Coopérative Ouvrière de Production (SCOP) Fraternelle (Persaudaraan). Alasan utama menggunakan nama dan mengaplikasikan sistem tersebut adalah selain didasarkan kepada rasa solidaritas sesama eksil, juga adanya upaya untuk meningkatkan taraf hidup yang layak negara tersebut, tanpa meninggalkan identitas keindonesiaan mereka. Selain tersedia beraneka macam masakan Indonesia, di Restoran tersebutlah representasi wajah Indonesia ditampilkan melalui ragam acara kesenian dan kebudayaan. Banyak tokoh-tokoh politik penting di Perancis sering berkunjung ke Restoran tersebut, seperti Madame Daniele Mitterrand (Isteri mantan Presiden Perancis, Francois Mitterrand), Louis Joinnet (Mantan Penasehat Hukum dari 5 Perdana Menteri

Perancis). Tidak ketinggalan juga para sastrawan Perancis. Saat dikenal publik Perancis inilah Restoran Koperasi ini kerap kali menjadi rujukan mengenai Indonesia ketimbang kantor KBRI Perancis sendiri (Adam, 2011).

Berbeda dengan ketiga eksil di atas yang lebih mengkhususkan kepada gerakan kultural dalam mengadvokasi kasus mereka, Djoemaeni Kartaprawira bersama teman-teman eksil lainnya, mendirikan Lembaga Pembela Korban (YLK) 1965. Selain untuk mendorong penguatan keadilan di Indonesia dengan mendukung rancangan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), lembaga ini aktif mengampanyekan pengungkapan kebenaran dan keadilan sejarah terkait dengan peristiwa 1965-1966, baik yang ada di tanah air maupun luar negeri. Dengan memanfaatkan kehadiran internet, kelompok ini mensosialisasikan gagasannya melalui surat elektronik dan (kini) media sosial seperti blog. Selain itu, mereka juga membangun jaringan dan aliansi dengan kelompok NGO yang berbasis HAM di Indonesia, khususnya Jakarta (Mudzakkir, 2013). Di sini ada dua tuntutan kepada negara Republik Indonesia yang menjadi alasan mengapa lembaga ini berdiri. *Pertama*, pemulihan kembali secara adil dan berperi kemanusiaan hak-hak asasi mereka, baik itu politik, sosial, ekonomi, yang telah dirampas oleh rezim Orde Baru. *Kedua*, dihapuskannya segala peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan represif, baik yang berlaku saat ini maupun di masa yang akan datang (www.lembaga-pembela-korban-1965.blogspot.com, 2010).

Dalam konteks Jerman, para eksil Indonesia memberikan kontribusi penting bersama aktivis Jerman dalam mendirikan Ornop (Organisasi Non Pemerintah) *Watch Indonesia* pada tahun 1991 yang memfokuskan tujuan kepada gerakan HAM pada era rezim Orde Baru. Hal ini karena mereka selalu melakukan perlawanan selama rezim Orde Baru berkuasa melalui PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) yang didirikan sejak tahun 1954. Rezim Orde baru sendiri direpresentasikan melalui kehadiran KBRI Berlin. Bentuk perlawanan ini bisa dilihat dengan adanya sejumlah protes, seperti kritik kepada peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari), 15 Januari 1974 serta penolakan menghadiri upacara Kesaktian Pancasila di KBRI Jerman

Barat. Dua sikap kritis tersebut membuat KBRI tersebut curiga dan mereka menduga bahwa PPI tersebut telah diisi oleh ideologi komunis (baca: PKI) dan para Sukarno. Hal itu berakibat renggangnya hubungan KBRI Jerman dengan PPI. Diakui, generasi pertama mahasiswa Indonesia di Republik Demokratis Jerman (German Democratic Republic) pada tahun 1960-an adalah mereka yang memiliki simpati dengan PKI. Contohnya adalah Soebronto K. Atmodjo (1929-1982), yang dikirim oleh Sukarno melalui pemerintah Indonesia untuk belajar musik bersama dengan 60 mahasiswa lainnya. Meskipun demikian, ada juga yang anti komunis, yaitu Xing Hu Kuo sebagai orang Indonesia Cina pertama yang dikirim Sukarno. Jauh sebelum itu, Prasetyo Soeharto adalah salah satu orang Indonesia pertama di Jerman pada tahun 1957 (Hasyim, 184-186).

Bertolak dari penjelasan di atas, meskipun secara geografis mereka tidak tinggal di Indonesia, bukan lagi warga negara Indonesia, dan aktivitas sosial mereka tentang hal-hal yang terkait dengan Indonesia, dalam kacamata Benedict Anderson (1994), mereka ini adalah bentuk dari nasionalisme jarak jauh. Istilah ini dikemukakan oleh Anderson saat melihat fenomena munculnya komunitas Macan Tamil di Toronto dan London serta adanya upaya kemerdekaan dari gerakan Khalistan yang ingin merdeka dari India di Melbourne dan Chicago. Lebih jauh, Schiller (2007: 570) mendefinisikan nasionalisme jarak jauh sebagai satu perangkat mengenai klaim identitas dan praktik-praktik yang dilakukan yang menghubungkan orang-orang yang tinggal di pelbagai wilayah geografis kepada wilayah khusus yang mereka anggap sebagai *rumah leluhur mereka*. Tindakan-tindakan yang diambil atas nama rumah leluhur mereka, di antaranya, ikut serta pemilihan umum, melakukan demonstrasi, memberikan kontribusi uang, menciptakan karya-karya seni, melakukan tindakan perkelahian, dan ataupun mati untuk tanah air yang mungkin tidak pernah mereka tinggali.

Kesimpulan

Negara Indonesia di bawah Sukarno memiliki bayangan yang jelas bagaimana pembangunan ke depannya. Kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik menjadi falsafah utama untuk menggerakkan negara dan bangsa yang baru

merdeka. Di sini, upaya menyekolahkan putera-puteri terbaik bangsa ke pelbagai belahan dunia dengan memanfaatkan hubungan internasional antar negara agar bisa memberangkatkan mereka dengan gratis adalah salah satu diplomasi yang tepat. Mereka yang disekolahkan dan melakukan kunjungan budaya atau tamu negara saat itu menjadi duta bangsa untuk kemajuan Indonesia ke depan. Upaya membangun Indonesia ini tidak mudah di tengah terbelahnya dunia menjadi dua kubu. Dengan kecerdikan diplomasi dan upaya mengangkat Indonesia lebih bertabiat di mata dunia, Sukarno berhasil mendapatkan materi atau keuntungan di tengah keterbelahan itu. Namun, peristiwa 1965-1966 meruntuhkan Indonesia yang dibayangkan tersebut. Melalui Gerakan 30 September 1965 dan diikuti dengan peristiwa 1965-1966, rezim Soeharto menghancurkan fondasi yang sudah dibangun oleh Sukarno.

Hal ini terlihat dengan adanya kebijakan pada 7 Mei 1966, diwakili Menteri Pendidikan Indonesia, Suharto mengeluarkan instruksi kepada mahasiswa Indonesia, intelektual publik, dan budayawan yang sedang melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan dan pernyataan loyalitas terhadap kepada pemerintah baru, yaitu Orde Baru di bawah Suharto. Metode pemeriksaan ini diumumkan Menteri Luar Negeri. Jika menolak, mereka hanya mendapatkan stempel ijin sekali pulang ke Indonesia. Akibatnya, jika menolak memberikan paspor atau masanya sudah habis, mereka tidak dapat kembali ke Indonesia dan kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Karena ketidaktahuan sistem baru ini dan juga upaya untuk menuntaskan studi mereka sampai selesai telah mengakibatkan orang Indonesia di luar negeri kehilangan kewarganegaraan mereka. Meskipun, banyak juga, karena sikap politik yang berpihak kepada Sukarno dan menjadi pengurus PKI luar negeri, mereka menolak pemeriksaan tersebut. Alasan penolakan tersebut adalah karena Orde Baru telah melakukan kudeta kepada pemerintahan yang sah.

Akibatnya, banyak dari mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang dikirim oleh Sukarno untuk belajar ke luar negeri tidak dapat pulang ke Indonesia. Mereka menjadi warga negara tanpa negara di negara-negara asing tempat mereka belajar. Mereka melalui tahun-tahun pertama sebagai *stateless* dalam kondisi yang sangat

memprihatinkan. Banyak dari mereka tidak memiliki uang karena beasiswa terputus dari pemerintah Indonesia dan/ lembaga donor yang memberikan beasiswa di tengah ketidakpastian perlindungan di negara tempat mereka belajar dan situasi sosial politik negara tersebut. Di antara mereka, tidak sedikit yang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan lainnya dalam menghadapi kesulitan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di sisi lain, mencari suaka dari satu negara ke negara yang lain bukanlah perkara yang mudah. Peristiwa 1965-1966 yang ditandai dengan Gerakan 30 September 1965 inilah yang memunculkan eksil 1965 Indonesia.

Di sini, meskipun tidak lagi menjadi warga negara Indonesia, sentimen dan rasa nasionalisme kebanyakan eksil Indonesia masih cukup kuat. Ini terlihat dengan aktivitas sosial yang mereka lakukan terkait dengan isu keindonesiaan, baik itu persoalan peristiwa 1965-1966, HAM, ataupun persoalan sosial lainnya. Selain membangun gerakan-gerakan kultural dengan mendirikan komunitas Yayasan Sapu Lidi, PERDOI di Belanda, dan Restoran Koperasi Indonesia di Paris, Perancis, mereka juga membentuk organisasi advokasi, yang bernama YLK 1965. Dalam konteks Jerman, para eksil Indonesia memberikan kontribusi penting bersama aktivis Jerman dalam mendirikan Ornop (Organisasi Non Pemerintah) *Watch Indonesia* pada tahun 1991 yang memfokuskan tujuan kepada gerakan HAM pada era rezim Orde Baru. Dalam konteks ini, kemunculan eksil 1965 dan aktivitas sosial mereka yang kuat mengenai Indonesia, meminjam istilah Benedict Anderson (1994), disebut sebagai komunitas nasionalisme jarak jauh. Dengan demikian, selain memberikan kontribusi penting terkait dengan sikap nasionalisme yang dimiliki, kehadiran eksil 1965 turut memberikan perluasan kajian akademik dalam ilmu-ilmu sosial mengenai diaspora atas apa yang disebut “menjadi Indonesia” di luar negeri, di mana perubahan kewarganegaraan mereka bukan karena persoalan ekonomi ataupun sosial ataupun upaya meminta perlindungan, melainkan karena adanya persoalan politik yang mengubah lanskap bangunan Indonesia pasca peristiwa 1965-1966.

Daftar Pustaka

- Adam, A.W. (2011). “Kembara Eksil dan Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia”, dalam Simposium Kewarganegaraan dan Keindonesian, diadakan oleh PMB-LIPI pada 26-27 Oktober, 2011, Jakarta: Gading Inti Prima.
- Anderson, B. (1994). ‘Exodus’, *Critical Inquiry*, 20 (2), 314–327.
- Anonim. (2013). “Kongres Diaspora Indonesia II (2nd Congress of Indonesian Diaspora): Pulang Kampung”, diadakan di Jakarta, 18–20 Agustus 2103, dikutip pada 20 Juli 2013 dari <http://www.indonesiandiaspora.com.au/documents/44299/46547/CID+Presentati on+by+Ibu+Vivi/27cffe73-b9b1-4eef-bb94-6391142080bf?version=1.0>.
- Budiawan. (2004). *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Suharto*. Jakarta: Elsam.
- Budiawan. (2012). “Living with the Spectre of the Past: Traumatic Experiences among Wives of Former Political Prisoners of the ‘1965 Event’ in Indonesia”, dalam R. Waterson & Kwok Kian-Woon (ed), *Contestations of Memory in Southeast Asia*, Singapura: NUS Press.
- Budiawan. (2013). “Tentang Pulang karya Leila S. Chudori dan Kontekstualisasi Fakta Historisnya”, disampaikan dalam diskusi Novel “Pulang”, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Yogyakarta, 1 Maret 2013.
- Farid, H. (2007). “Indonesia’s original sin: Mass killings and Capitalist Expansion, 1965–66”, dalam Kuan-Hsing Chen dan Chua Beng Huat (ed), *The Inter Asia Cultural Studies Reader*, New York: Routledge
- Farid, H. (2010). “Keadilan Bagi Timor Leste Prasyarat Demokrasi di Indonesia”. Makalah disampaikan dalam peluncuran buku *Chega!* di Perpustakaan Nasional, Jakarta, 7 Oktober 2010. Dikutip pada 10 Juli, 2013 dari <http://www.scribd.com/doc/39001922/Chega>.
- Farid, H. (2013). “Warisan Kunci Politik Orde Baru adalah Kemiskinan Imajinasi Politik,

- Sosial, dan Kultural!”, Wawancara dilakukan oleh Fildzah Izzati dalam Jurnal Indoprogress (online), edisi XII, 15 Juli 2013. Dikutip pada 20 Juli 2013 dari <http://indoprogress.com/lbr/?p=1364>.
- Hasyim, S. (2014). “Challenging a home country: A preliminary account of Indonesian student activism in Berlin, Germany”. *ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 7 (2), 183-198.
- Hearman, V. (2010). “The Last Men in Havana: the Indonesian Exiles in Cuba”, *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 44 (1), 83–109.
- Heryanto, A. (2006). *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally belonging*, London and New York: Routledge.
- Heryanto, A. (2012). “Film, Teror Negara, dan Luka Bangsa”, *Liputan Khusus Tempo: Pengakuan Algojo*, edisi 1-7 Oktober.
- Hill, D.T. (2010). “Indonesia’s exiled Left as the Cold War thaws”, *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 44 (1), 21–51.
- Hill, D.T. (2014). “Indonesian Political Exiles in the USSR”, *Critical Asian Studies*, 46 (4), 621-648.
- Sudjatmiko, I.G. (1992). *The Destruction of Indonesian Communist Party (PKI) A Comparative Analysis of East Java and Bali*, tesis Ph.D. Harvard University.
- Lebang, T. & Susanto, A.F. (2010). *Sahabat Lama Era Baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia*, Jakarta: Grasindo.
- Lembaga Pembela Korban. (2010). “Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat”, dikutip pada 7 April 2015 dari <http://lembaga-pembela-korban-1965.blogspot.com/2010/12/tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-berat.html>.
- Lindsay, J. (2012). “Heirs to World Culture 1950-1965, An Introduction”, dalam J. Lindsay & M.H.T Liem (Ed), *Heirs to World Culture, Being Indonesian 1950-1965*, Netherland: KITLV
- McGregor, K. (2007). *History in Uniform: Military Ideology and Construction of Indonesia’s Past*, Singapura: NUS Press.
- Mudzakkir, A. (2013). “Eksil Indonesia dan Nasionalisme Kita”, dalam Seminar Pusat Studi Sumber Daya Regional LIPI, Selasa, 3 Desember 2013.
- Patti Djalal, D. (2012). “Surat Undangan Terbuka – Congress of Indonesian Diaspora 6- 8 Juli 2012”, dikutip pada 20 Juli 2013 dari <http://dinopattidjalal.com/en/activity/27/surat-undangan-terbuka---congress-of-indonesian-diaspora-6-8-juli-2012.html>.
- Roosa, J., Ratih, A., & Farid, H. (2004). “Sejarah Lisan dan Ingatan Sosial”, dalam J. Roosa, A. Ratih, & H. Farid (ed), *Tahun yang tak Pernah Berakhir, Memahami Pengalaman Korban 65: Esai-esai Sejarah Lisan*, Jakarta: ELSAM, TIM Relawan untuk Kemanusiaan, dan Institute Sejarah Sosial Indonesia.
- Roosa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (terjemahan)*. Jakarta: Hasta Mitra dan Institut Sejarah Sosial Indonesia.
- Roosa, J. (2012). “Identitas Bangsa Indonesia Berubah Total Sesusah 1965”, Wawancara dilakukan oleh M. Zaki Hussein dalam Jurnal Indoprogress (online), edisi II, 17 September 2012. Dikutip pada 20 Juli 2013 dari <http://indoprogress.com/lbr/?p=243>
- Schiller, N.G. (2007). ‘Long-distance nationalism’, dalam C.R. Ember, M. Ember, & I.A. Skoggard (eds), *Encyclopaedia of Diasporas*, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, hlm. 570–80
- Sipayung, B.A. *Exiled Memories: the Collective Memory of Indonesian 1965 Exiles*, Tesis Master of Arts and Development Studies, International Institute of Social Studies, the Hague, Belanda.
- Subagya Toer, K. (2006). *Kampus Kabelnaya: Menjadi Mahasiswa di Uni Soviet*, Jakarta: Gramedia.
- Supartono, A. & Lisabona, R. (2001). “Studi Indonesia di Rusia: Sebuah Rumah Sejarah yang Alpa disinggahi”, Kompas, 6 Juli, 2001.
- Suwidi, T. (2012). “Dilema Jaringan Diaspora Indonesia”, Kompas, 11 Desember 2012.